



Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Bayongbong Dalam Pengelolaan Saluran Irigasi

Dewi Roro Arum Husnul Chotimah¹, Nina Karlina²

Universitas Padjadjaran

Email: Dewi20003@mail.unpad.ac.id

Received: 9 Februari 2024;

Revised: 24 Februari 2024;

Accepted: 9 Mei 2024

ABSTRACT

This research describes the results of research on the organizational capacity of the Bayongbong Village Government in the Management of Irrigation Canals in Bayongbong Village. This research uses a qualitative research method to find out how the organizational capacity of the Village Government, especially in the management of village irrigation channels. Data collection was carried out by observing and interviewing. Organizational capacity can be measured through several dimensions, namely staff members, Infrastructure, Technology, and Financial Resources, Strategic Leadership, Program and Management Process, and Networking and Linkages (Horton, 2003). The results of the research in this thesis show that the organizational capacity of the Bayongbong Village Government in managing village irrigation channels is quite good, but there are several problems including the limited number of human resources in managing irrigation buildings, irrigation management that has not been organized in an equitable and proportional manner in accordance with the needs of the people who use clean water from irrigation channels, and the allocation of funds made in the village budget still cannot solve problems related to village irrigation management.

Keywords: Organizational capacity, village government, irrigation canals.

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan hasil penelitian mengenai kapasitas organisasi Pemerintah Desa Bayongbong dalam Pengelolaan Saluran Irigasi di Desa Bayongbong. tulisan ini menggunakan metode berupa penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi Pemerintah Desa khususnya dalam pengelolaan saluran irigasi desa. Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi dan mewawancarai pihak-pihak terlibat dalam hal pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong. Desa Bayongbong memiliki saluran irigasi yang cukup mendominasi dan berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya sehingga pengelolaan saluran irigasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Bayongbong. Kapasitas organisasi dapat diukur melalui beberapa dimensi, yaitu Staff Members, Infrastructure, Technology, and Financial Resources, Strategic Leadership, Program and Management Process, dan Networking and Linkages (Horton, 2003). Hasil menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Pemerintah Desa Bayongbong dalam pengelolaan saluran irigasi desa sudah cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan di antaranya keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dalam mengelola bangunan irigasi, pengelolaan irigasi yang belum terselenggarakan secara berkeadilan dan proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air bersih dari saluran irigasi, dan pengalokasian dana yang dibuat dalam anggaran desa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan irigasi desa.

Kata kunci: Kapasitas organisasi, pemerintah desa, saluran irigasi.

©2024 by Dewi Roro Arum Husnul Chotimah, Nina Karlina
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Dalam suatu pemerintahan, setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat (Sugiman, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dikatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak-hak tradisional lainnya yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 19, disebutkan juga bahwa pemerintah desa memiliki peran penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Salah satu kewenangan desa meliputi kewenangan lokal berskala desa, dimana saluran irigasi menjadi salah satu contohnya.

Di Indonesia, fokus pembangunan negara salah satunya berfokus pada kawasan pertanian, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan produk strategis terpenting yang berkaitan dengan pangan. Pada 2020, melalui siaran pers No. HM.4.6.175/SET.M.EKON.2.3/11/2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah mendorong peningkatan sektor pangan dan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan menjadi salah satu sektor yang selalu tumbuh positif meskipun dalam kondisi pandemi. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Peranan sektor pertanian cukup dominan di Indonesia didukung dengan total 38.703.996 penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas pada bulan Agustus 2022 bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS, 2022). Dengan sektor pertanian yang cukup dominan ini, irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang sektor tersebut.

Di Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan produksi padi sebagai hasil dari sektor pertanian kedua setelah Jawa Timur dengan angka 9.433.723 ton pada tahun 2022 (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa saluran irigasi

merupakan hal yang penting untuk menunjang produktivitas sektor pertanian di Jawa Barat. Sedangkan, di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang perekonomiannya selalu didominasi oleh sektor pertanian dari tahun ke tahun, khususnya pada tanaman pangan (Website Kabupaten Garut, 2022). Di Kabupaten Garut, Desa Bayongbong merupakan salah satu desa dengan sektor pertanian yang cukup mendominasi. Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, penduduk Desa Bayongbong mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan total 810 penduduk dan petani dengan total 520 penduduk. Dari total luas lahan menurut jenis penggunaan Desa Bayongbong, selain pemukiman, luas pesawahan menempati urutan kedua terluas dengan luas 97,00 ha/m². Hal ini cukup menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi yang baik perlu diupayakan guna menyokong sektor pertanian di Desa Bayongbong.

Dengan banyaknya wilayah pedesaan yang tersebar di wilayah Indonesia, urusan irigasi desa juga menjadi hal yang perlu diperhatikan guna mendukung sektor pertanian desa. Di Indonesia, banyak irigasi desa yang telah dibangun untuk meningkatkan produksi pangan, namun dari banyaknya irigasi desa yang telah dibangun tersebut tentunya masih terdapat irigasi desa yang belum berfungsi secara optimal (Supadi 2007). Pada PermenPUPR Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 khususnya pada Pasal 1 Ayat 18 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dijelaskan bahwa jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya pengelolaan saluran irigasi desa guna menopang sektor pertanian desa.

Di Kabupaten Garut, Desa Bayongbong merupakan salah satu desa dengan sektor pertanian yang cukup mendominasi. Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, penduduk Desa Bayongbong mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan total 810 penduduk dan petani dengan total 520 penduduk. Dari total luas lahan menurut jenis penggunaan Desa Bayongbong, selain pemukiman, luas pesawahan menempati urutan kedua terluas dengan luas 97,00 ha/m². Hal ini cukup menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi yang baik

perlu diupayakan guna menyokong sektor pertanian di Desa Bayongbong.

Dengan sektor pertanian yang cukup mendominasi Desa Bayongbong, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 19 terkait kewenangan pemerintah desa, maka pemerintah desa Bayongbong memiliki peran yang cukup penting dalam mengatasi segala faktor yang dapat mendukung keberlangsungan sektor pertanian khususnya dalam upaya pengelolaan saluran irigasi. Selain itu, kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa yang memiliki fungsi dalam melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan juga memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang menjadi faktor keberlangsungan sektor pertanian.

Di Desa Bayongbong, penanganan pengairan dan irigasi diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para petani sawah dan ladang serta kolam masyarakat. Ditemukan bahwa kondisi jaringan pengairan dan irigasi di Desa Bayongbong pada tahun 2021 lalu sangat memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam hal pengairan dan irigasi Desa Bayongbong. Pemerintah Desa Bayongbong merasa perlu untuk melakukan terobosan dalam upaya pengelolaan saluran irigasi. Upaya pengelolaan saluran irigasi merupakan program yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan desa saat ini. Hal ini berangkat dari hampir 75% masyarakat Desa Bayongbong khususnya di Dusun I sampai Dusun III memerlukan air untuk membuat sawah dan ladang menjadi lebih produktif dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan hasil dari pertanian baik padi ataupun sayur mayur. Dusun III memiliki dampak yang cukup parah terkait kekeringan dikarenakan banyak pipa yang bocor dan masih sederhana. Ditemukan pula permasalahan mendasar dalam pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong, yakni pemerintah desa menilai adanya keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dalam mengelola bangunan irigasi, pengelolaan irigasi yang belum terselenggarakan secara berkeadilan dan proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air bersih dari saluran irigasi yang telah dimiliki oleh Desa Bayongbong, dan pengalokasian dana yang dibuat dalam anggaran desa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan

terkait pengelolaan irigasi desa.

Pengelolaan dan pembangunan saluran irigasi di desa tidak terlepas dari berbagai permasalahan, di antaranya seperti keterhambatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, diperlukannya upaya inovatif dalam menyiapkan sistem irigasi guna memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, diperlukannya pengelolaan infrastruktur irigasi, pengelolaan air irigasi yang belum teratur, dan kondisi jaringan irigasi desa yang sudah mengalami banyak kerusakan (Sidauruk, T 2009; Akbarullah, M 2020; Andriana, P 2022). Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa kapasitas organisasi khususnya pemerintah desa dalam pengelolaan irigasi di Desa Bayongbong. Hal ini terdapat pada bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan perannya dalam memprakarsai pengelolaan saluran irigasi.

METODE

Metode yang terdapat dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. (Creswell, 2016). Sedangkan pendekatan deskriptif yang dimaksud digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis kejadian di lapangan, baik alam maupun buatan manusia dengan berfokus pada sifat, kualitas, dan hubungan antar kegiatan (Sugiyono, 2013). Dalam hal pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu menggunakan hasil wawancara dan dokumen yang relevan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Staff Members

Dalam sebuah organisasi, kunci dari kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat ditentukan oleh faktor sumberdaya manusia (Iqbal, M., Mirna, R., & Susanti, E. 2022). Sumberdaya manusia yang dibutuhkan organisasi merupakan sumberdaya profesional yang merujuk pada prosedur perekrutan pegawai, kuantitas, dan skill yang dimiliki oleh para pegawai

(Horton 2003). Pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong oleh Pemerintah Desa melibatkan Kepala Dusun, RT, RW, dan Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab besar di dalamnya. Kepala Desa memiliki andil yang cukup besar dalam pengelolaan saluran irigasi desa sementara tugas dan kewenangan dibagikan kepada 12 RW dan P3A Mitra Cai. Kepala Dusun telah melaksanakan tugasnya di setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan saluran irigasi. Kepala Dusun selalu hadir dalam program-program yang dijalankan secara rutin. Begitu juga dengan P3A Mitra Cai yang selalu turut andil dalam program terkait pengelolaan saluran irigasi yang ada. Begitu pula dengan RT dan RW yang ada, RT dan RW baik di Dusun I, II, mau pun III ikut terlibat dengan segala pengambilan keputusan dan juga program terkait pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong, namun memang pada kenyataannya dari sisi kualitas sumberdaya manusia, staff Pemerintah Desa khususnya Kepala Dusun belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengelolaan saluran irigasi. Selain terkait bagaimana staff Pemerintah Desa turut andil dalam peranannya masing-masing pada proses pengelolaan saluran irigasi desa, staff Pemerintah Desa juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang irigasi mengingat irigasi merupakan hal yang penting di Desa Bayongbong dan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

Selain itu dari segi kuantitas, masih terdapat keterbatasan sumberdaya manusia. Hal ini terjadi khususnya pada petugas yang menjaga bendungan air yang mayoritas sudah pensiun dan belum ada yang menggantikan sehingga terkadang terjadi kebingungan dalam mengatur lalu lintas air menjelang musim hujan. Kemudian dalam hal perekrutan staff Pemerintah Desa Bayongbong dilakukan dengan proses pendaftaran dan pelaksanaan test. Namun terdapat beberapa staff yang melanjutkan kepengurusan dari tahun kepengurusan sebelumnya. Dengan saluran irigasi yang mendominasi masyarakat Desa Bayongbong dalam kehidupan sehari-hari, staff Pemerintah Desa juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan saluran irigasi melalui test yang diberikan. Hal ini dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan suatu kebijakan atau program terkait saluran irigasi

yang digunakan masyarakat agar nantinya lebih terpelihara dan terkelola dengan baik. Selain itu, Pemerintah Desa Bayongbong tidak memiliki dokumen penilaian kinerja staff sehingga memiliki kemungkinan akan berdampak pada kualitas dari sumberdaya manusia di Pemerintah Desa Bayongbong yang sulit diukur tanpa adanya dokumen penilaian kinerja tersebut.

B. Infrastructure, Technology, and Financial Resources

Kapasitas operasional yang ada pada dimensi ini meliputi sumberdaya keuangan, akuntansi dan kontrol keuangan, ketersediaan teknologi, fasilitas dan sistem pemeliharaan, dan perencanaan dan pengelolaan fasilitas. Infrastruktur dalam hal kapasitas organisasi mengacu pada kuantitas, kualitas, dan jenis bangunan, kendaraan, dan persediaan yang diperlukan untuk operasi organisasi.

Sebuah organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal memerlukan fasilitas, ruang kerja, peralatan, dan teknologi yang dapat menunjang kegiatan organisasi. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, organisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Organisasi sektor public tidak hanya memerlukan tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang berkualitas, tetapi memerlukan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (Fiszbein, 1997). Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka sumberdaya manusia yang berkualitas pun dapat menjadi tidak efektif.

Dalam pengelolaan irigasi, infrastruktur merupakan salah satu pilar irigasi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Infrastruktur irigasi terdiri dari bangunan irigasi di antaranya bangunan utama, bangunan pengatur, dan bangunan pelengkap. Infrastruktur saluran irigasi di Desa Bayongbong sudah cukup lengkap dengan adanya bangunan utama, bangunan pengatur, dan bangunan pelengkap.

Bangunan utama yang terdapat pada Desa Bayongbong, yakni satu buah bendungan dan dua buah mata air yang terletak di Dusun I dan Dusun II, dalam hal ini terdapat bangunan utama yang kurang, yakni tidak adanya mata air di Dusun III yang menyulitkan masyarakat Dusun III dalam memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, pengambilan bebas, waduk, dan stasiun pompa. Dalam hal bangunan pengatur, di Desa Bayongbong sendiri telah terdapat

bangunan pengatur jaringan utama yang membagi air saluran primer untuk dialirkan ke saluran sekunder yang tersebar di wilayah Dusun I dan Dusun II. Bangunan ini terletak pada Bendungan Sifon yang tertera pada gambar di atas. Bangunan pengatur jaringan tersier juga sudah tersedia untuk membagi sumber air kepada rumah-rumah warga dimana saluran irigasi tersier ini kebanyakan dikelola langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam hal bangunan pelengkap, Desa Bayongbong telah memiliki talang irigasi yang terpasang di sepanjang sungai Jamban Sari, Desa Bayongbong dan jalan dan jembatan yang telah dibangun dan dapat digunakan dengan baik untuk mobilisasi masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat Desa Bayongbong dalam beraktivitas.

Selain bangunan, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga perlu memiliki peta dan pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan yang akan membantu pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi. Desa Bayongbong belum memiliki peta saluran irigasi desa dan juga SOP secara tertulis, sehingga masih berpedoman pada arahan dari Kepala Desa saja.

Dalam hal teknologi, Pemerintah Desa Bayongbong bersama dengan UPT Dinas PUPR Kabupaten Garut yang terletak di daerah Bayongbong juga memiliki kesulitan dalam menemukan teknologi yang cocok untuk mengatasi kekeringan di wilayah Dusun III. Selain itu, dalam hal finansial, Pemerintah Desa Bayongbong memiliki kekurangan, yakni pengalokasian dana yang dibuat dalam anggaran desa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan irigasi desa. Berdasarkan hasil observasi, Kampung Sukahejo yang terletak di Dusun III mengalami kekeringan cukup parah. Saluran irigasi sudah tersedia, akan tetapi tidak ada satu pun yang dialiri oleh air. Saluran irigasi di Dusun III didominasi dengan tumpukan sampah. Selain itu, pipa-pipa saluran irigasi pun sudah tidak terkelola dengan baik. Masyarakat Dusun III hanya dapat bergantung pada program distribusi air dari Pemerintah Desa.



Gambar 1. Kondisi Saluran Irigasi di Dusun III Desa Bayongbong

Selain itu, dalam hal finansial, Pemerintah Desa Bayongbong memiliki kekurangan, yakni pengalokasian dana yang dibuat dalam anggaran desa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan irigasi desa. Untuk memenuhi segala kebutuhan air dengan saluran irigasi desa sebagai sumber dominannya, tentunya Desa Bayongbong memerlukan anggaran. Berdasarkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Bayongbong Tahun Anggaran 2022, rincian prioritas pembangunan Desa Bayongbong beserta biaya yang dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Biaya Prioritas Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO	JENIS KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	CAPAIAN
1.	Hotmix Jalan Desa	300.000.000	APBN	100%
2.	Pembangunan Irigasi	106.719.000	APBN	100%
3.	PKTD Saluran Air Sungai	20.000.000	APBN	100%
4.	Rehabilitasi Kolam	15.000.000	APBN	100%
5.	Pulsa Sapa Warga	7.800.000	APBD Prov	100%
6.	Penegasan Batas Desa	10.000.000	APBD Prov	100%
7.	Konten Media Billboard	3.000.000	APBD Prov	100%
8.	Revitalisasi Posyandu	22.000.000	APBD Prov	100%

Dalam tabel tersebut, dituliskan bahwa biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bayongbong khususnya dalam pembangunan irigasi berjumlah Rp106.719.000,00 yang bersumber dari APBN dengan ketercapaian 100% pada tahun 2022. Namun, apabila melihat pada kondisi lapangan, pembangunan irigasi di Desa Bayongbong belum sepenuhnya terlaksana. Bahkan apa yang telah diupayakan, seperti pengeboran pun masih belum menunjukkan hasil. Pembangunan irigasi di Desa Bayongbong pun belum

mendapatkan pembaharuan, masih menggunakan infrastruktur yang memang telah dibangun pada masa-masa sebelumnya.

Tabel 1. Biaya Prioritas Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	JENIS KEGIATAN	BIAYA	SUMBER DANA	CAPAIAN
1.	Kegiatan TP. PKK	3.359.138	ADD	100%
2.	Kegiatan Posyandu	23.040.000	ADD	100%
3.	Kegiatan LPMD	2.000.000	ADD	100%
4.	Kegiatan MUI Desa	1.000.000	ADD	100%
5.	Kegiatan Karang Taruna	250.000	ADD	100%
6.	Kegiatan Linmas	500.000	ADD	100%
7.	Kegiatan P3A Mitra Cai	250.000	ADD	100%
8.	Kegiatan Pengelola TPU	250.000	ADD	100%

Dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah Dusun III, Desa Bayongbong menggunakan jasa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yakni LPM Desa Bayongbong itu sendiri. Berdasarkan tabel di atas, untuk kegiatan LPMD sendiri tertulis bahwa terdapat biaya sebesar Rp2.000.000,00 dengan capaian 100% di tahun 2022. Namun dalam segala kebutuhannya dalam mendistribusikan air bersih, LPM Desa Bayongbong tidak mendapat biaya sepeserpun sehingga membuat Ketua LPM Desa Bayongbong menggunakan biaya pribadi untuk segala kepentingan operasional. Hal ini menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana anggaran ini dikelola oleh Pemerintah Desa Bayongbong.

C. Strategic Leadership

Kepemimpinan strategis mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta peluang di luar lingkungan organisasi, serta mengoordinasikan anggota tim menuju pencapaian tujuan organisasi (Horton 2003). Kepemimpinan strategis atau strategic leadership dibutuhkan dalam mengatur jalannya semua kegiatan dalam suatu organisasi. Hal ini dibutuhkan agar suatu organisasi berjalan tetap pada jalurnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan memiliki peranan kuat terhadap arah suatu organisasi. Organisasi dapat dikatakan berhasil dengan adanya kepemimpinan yang baik. Tujuan dari adanya kepemimpinan strategis dalam organisasi adalah untuk menyiapkan kondisi organisasi dalam menghadapi berbagai hal dinamis yang kemungkinan akan terjadi di masa depan.

Pemerintah Desa Bayongbong dipimpin oleh Kepala Desa dan telah menentukan tujuannya dalam visi dan misi Kepala Desa yang telah dijabarkan

secara rinci pada gambaran umum Desa Bayongbong. Salah satu pembangunan infrastruktur desa yang masuk ke dalam visi dan misi Kepala Desa Bayongbong yakni pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan di tiap-tiap dusun yang berupa TPT dan pembenahan irigasi, meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan desa, serta meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat, Pemerintah Desa telah melakukan program kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap minggu di setiap wilayah baik itu di Dusun I, II, dan dusun III. Kerja Bakti dilakukan bersama-sama dengan Kepala Dusun, RT/RW, dan masyarakat. Masyarakat setiap dusun turut berpartisipasi dalam program kerja bakti yang dilaksanakan dengan membersihkan setiap saluran irigasi yang mengalir dari sampah yang berpotensi menyumbat aliran air dan mencabut rumput-rumput yang menutupi pipa-pipa saluran irigasi agar apabila ada kerusakan di pipa maka akan dapat dengan mudah terlihat.

Selain dengan kerja bakti, pengelolaan irigasi di Desa Bayongbong juga dilakukan dengan pemeliharaan kebersihan saluran irigasi dari berbagai sampah dengan adanya pengangkutan sampah masyarakat secara rutin setiap Hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan menggunakan motor pengangkut sampah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat teredukasi dan merasa ikut bertanggung jawab tentang kebersihan saluran irigasi khususnya sungai.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa juga turut menghimbau secara berkala kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan memelihara kebersihan saluran irigasi dari sampah. Di tahun ini, Kepala Desa juga telah menginisiasi terkait pembuatan mural-mural di bantaran sungai yang berisikan kalimat-kalimat edukasi larangan membuang sampah ke sungai yang menjadi saluran irigasi di Desa Bayongbong.

Melihat bahwa Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya di wilayah Dusun I dan Dusun II, lain halnya pada Dusun III. Masyarakat mengatakan bahwa jarang sekali Kepala Desa menghadiri wilayah Dusun III, terutama ketika sedang diadakan kegiatan kerja bakti atau pun distribusi air bersih. Masyarakat Dusun III

juga mengatakan bahwa masyarakat Kampung Sukahejo yang berada di Dusun III jarang mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait irigasi sehingga masih banyak saluran irigasi yang bahkan terisi sampah.

D. Program and Management Process

Organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan memerlukan suatu proses manajemen. Manajemen dalam organisasi dapat berupa proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumberdaya organisasi. Tujuan utama adanya manajemen proses dalam mengetahui bagaimana kapasitas sebuah organisasi dalam mengelola suatu hal adalah untuk mencapai apa yang ingin dicapai oleh organisasi dengan cara seefisien mungkin. Kapasitas operasional dalam dimensi ini meliputi manajemen proyek, perencanaan dan perumusan program, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan serta komunikasi.

Suatu organisasi memerlukan proses manajemen dan program untuk mencapai tujuannya. Program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Bayongbong di antaranya yakni kerja bakti, distribusi air bersih, pembuatan Pamsimas, dan pembuatan mural untuk memelihara kebersihan sungai. Program tersebut telah terlaksana dengan baik namun pembuatan Pamsimas di tahun ini baru sampai di tahap pembangunan dan belum bisa digunakan.

Program kerja bakti dilakukan secara rutin setiap minggunya pada wilayah Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dan Kepala Dusun sering melakukan kunjungan untuk membantu. Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat aktif. Melalui kerja bakti ini, masyarakat turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara saluran irigasi yang menjadi sumber air utama masyarakat desa.

Pada tahun 2023 ini, seperti yang sudah disebutkan, Kepala Desa juga menginisiasi program pembuatan mural pada bantaran sungai yang berisikan kalimat-kalimat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara saluran irigasi khususnya sungai. Pembuatan mural baru dilaksanakan di tahun ini dengan bantuan masyarakat dan mahasiswa KKN yang kebetulan sedang melaksanakan KKN di Desa Bayongbong. Pembuatan mural ini sudah terlaksana di Dusun I dan Dusun II. Pembuatan mural ini juga diharapkan dapat

berdampak pada kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terkait menjaga saluran irigasi desa. Masyarakat mengatakan bahwa pembuatan mural di bantaran sungai Desa Bayongbong cukup berpengaruh dengan berkurangnya masyarakat yang membuang sampah ke saluran irigasi dari hari ke hari. Selain itu, masyarakat juga merespon baik dengan adanya program ini. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran irigasi, adanya mural menambah kesan estetika di bantaran sungai.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berjalannya program-program ini adalah pengelolaan irigasi yang belum terselenggarakan secara berkeadilan dan proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air bersih dari saluran irigasi. Hal ini dikarenakan dari total tiga dusun yang ada, masyarakat Dusun III tidak bisa menggunakan sumber air secara leluasa sehingga Pemerintah Desa perlu menyalurkan air bersih melalui program distribusi air bersih yang dikelola langsung oleh LPMD Bayongbong. Meskipun distribusi air ini berjalan tanpa adanya kendala yang cukup serius, masyarakat Dusun III tetap mengkritik Pemerintah Desa karena di Dusun III sendiri tidak ada mata air yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari layaknya di Dusun I dan Dusun II yang berkecukupan dalam hal penggunaan air. Bahkan masyarakat Dusun III pada setiap harinya hanya bergantung pada program distribusi air bersih yang ada, seperti halnya untuk air konsumsi, mandi, dan mencuci.

Pada saat pelaksanaan distribusi air bersih ini, biasanya masyarakat berbondong-bondong menyiapkan wadah air untuk menampung air yang didistribusikan. Masyarakat cukup menyayangkan tidak adanya mata air di Dusun III layaknya Dusun I dan II yang tidak kesusahan dalam memperoleh air. Namun masyarakat juga cukup bersyukur dengan adanya program distribusi air bersih yang diberikan. Masyarakat Dusun III memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menampung air sebanyak-banyaknya untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari. Berikut merupakan hasil dokumentasi dimana masyarakat telah menyiapkan berbagai wadah air dengan berbagai ukuran apabila waktu distribusi air bersih telah tiba.

Masalah terakhir dalam pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong

adalah sampah yang tertimbun di beberapa titik saluran irigasi, terutama di wilayah RW 10. Hal ini disebabkan karena motor pengangkut sampah yang tidak mencapai wilayah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Dalam mengatasi tindakan tersebut, Pemerintah Desa belum menentukan sanksi apapun kepada masyarakat yang sering membuang sampah pada saluran irigasi. Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi sosial. Namun Pemerintah Desa telah berencana untuk membuat Peraturan Desa untuk mengatur hal tersebut, meskipun masih banyak pertimbangannya sehingga belum terlaksana.

Pada pelaksanaan setiap program terkait pengelolaan irigasi yang telah disebutkan, aparat Pemerintah Desa Bayongbong juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan program ini. Namun, berdasarkan pengakuan masyarakat di Dusun III sendiri, biasanya hanya Kepala Dusun yang datang berkunjung dan turun langsung, masyarakat Dusun III sangat jarang melihat kehadiran Kepala Desa dalam melakukan monitoring wilayah Dusun III saat ini. Selain itu, kekurangan yang dimiliki Pemerintah Desa Bayongbong dalam hal program dan proses manajemen adalah masih belum adanya SOP dalam pengelolaan saluran irigasi dan monitoring yang jarang dilakukan oleh Kepala Desa pada wilayah Dusun III.

E. Networking and Linkages

Dimensi ini merupakan bentuk ikatan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu kerjasama pada satu bidang tertentu atau pun tujuan tertentu dengan berbagi ide, informasi, dan sumber daya dalam melaksanakan program tertentu. Kapasitas hubungan dan jaringan dalam organisasi dilihat berdasarkan bagaimana kemampuan organisasi dapat menciptakan suatu hubungan kerja dengan unit lain, contohnya seperti mitra, pemerintah, publik dan swasta.

Pemerintah Desa Bayongbong dalam mengelola saluran irigasi desa bekerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya Dinas PUPR Kabupaten Garut melalui UPT yang terletak di Desa Bayongbong itu sendiri, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, P3A Mitra Cai, LPMD, dan masyarakat. Hubungan kerjasama yang dijalin oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan saluran irigasi dengan lembaga lainnya

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hubungan Kerjasama Pemerintah Desa dengan Lembaga Lain dalam Pengelolaan Saluran Irigasi Desa

Lembaga	Hubungan Kerjasama
UPT Dinas PUPR Desa Bayongbong	Bekerjasama dalam hal pembangunan saluran irigasi desa dan bangunan-bangunan pendukung irigasi serta melakukan perbaikan bangunan irigasi setelah adanya pengajuan dari Pemerintah Desa.
Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW	Berkoordinasi terkait pengawasan terhadap pengelolaan saluran irigasi di setiap wilayah dusunnya masing-masing.
P3A Mitra Cai	Membantu pelaksanaan pengelolaan saluran irigasi dan pembangunan saluran irigasi bersama dengan Pemerintah Desa dan UPT Dinas PUPR Desa Bayongbong
LPM Desa Bayongbong	Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam hal program distribusi air bersih.

UPT Dinas PUPR memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dari Dinas PUPR, hal ini berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. UPT Dinas PUPR di Desa Bayongbong biasanya bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan saluran irigasi. Biasanya Pemerintah Desa melakukan pengajuan program untuk pembangunan atau pun pembenahan bangunan saluran irigasi yang ada. Setelah adanya pengajuan, UPT Dinas PUPR Desa Bayongbong akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengeksekusi pembangunan saluran irigasi yang nantinya akan dibantu juga oleh P3A Mitra Cai dalam pelaksanaannya.

Kepala Dusun, Ketua RT, dan RW bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kerja bakti di setiap wilayahnya. Biasanya segala permasalahan yang terlapor pada Ketua RT maupun RW nantinya akan dilaporkan ke Kepala Dusun yang kemudian akan diteruskan kepada Kepala Desa. Namun di Dusun I sendiri, biasanya Ketua RT dan Ketua RW melapor kepada Kepala Desa secara langsung untuk mendapat respon yang lebih cepat.

P3A Mitra Cai memiliki peranan yang cukup penting untuk turun langsung ke lapangan. Apabila terdapat program pembangunan yang diberikan oleh UPT Dinas PUPR Desa Bayongbong dengan Pemerintah Desa, P3A Mitra Cai bertugas untuk membantu pelaksanaannya. P3A Mitra Cai juga memiliki peranan dalam

perencanaan program, pemberdayaan petani, monitoring dan evaluasi, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan saluran irigasi desa.

LPMD Bayongbong berperan cukup besar dalam keberlangsungan masyarakat Kampung Sukahejo yang ada di Dusun III untuk memperoleh air bersih. Dalam melaksanakan distribusi air bersih, LPMD berkoordinasi dengan Pemerintah Desa terutama saat akan melaksanakan kegiatan. Biasanya Pemerintah Desa mengutus Kepala Dusun III untuk memantau langsung proses distribusi air bersih. LPMD Bayongbong setiap harinya selalu mendistribusikan air bersih sebanyak tujuh kali sehari dengan rincian 35.000 liter air bersih yang didistribusikan sehari. Meskipun menggunakan biaya pribadi, namun hal ini tetap dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah Desa.

Pembahasan

Dalam hal pengelolaan sumberdaya manusia yang ada pelatihan terkait setidaknya pengetahuan mendasar tentang pengelolaan saluran irigasi desa cukup diperlukan di lingkungan Pemerintah Desa Bayongbong. Namun pada faktanya, staff Pemerintah Desa Bayongbong tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan saluran irigasi. Akan tetapi, Pemerintah Desa sendiri menganggap bahwa pelatihan adalah hal yang cukup penting. Untuk saat ini, Pemerintah Desa hanya mengikuti ketentuan dari pusat terkait pelatihan irigasi apabila memang pemerintah pusat mengharuskan pegawai pemerintah desa untuk mengikuti pelatihan.

Permasalahan lainnya terkait sumberdaya manusia yang didapati dalam pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong adalah adanya keterbatasan sumberdaya manusia. Hal ini terjadi khususnya pada petugas yang menjaga bendungan air yang mayoritas sudah pensiun dan belum ada yang menggantikan sehingga terkadang terjadi kebingungan dalam mengatur lalu lintas air menjelang musim hujan.

Dalam LKPPD Bayongbong 2022 tertulis bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah desa khususnya dalam kegiatan pembangunan irigasi telah terealisasi dengan sumber dana yang berasal dari dana desa. Namun pada kenyataannya

beberapa permasalahan seperti khususnya yang terjadi pada Dusun III masih menggunakan dana pribadi dari anggota LPM Desa Bayongbong. Pemerintah Desa Bayongbong perlu meninjau kembali bagaimana strategi terkait pengelolaan anggaran yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup penting terutama terkait masyarakat yang kekurangan air bersih.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Bayongbong saat ini telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, dalam halnya pengelolaan irigasi, masyarakat mengikuti kerja bakti. Selain itu, kesadaran dan kepedulian masyarakat saat ini dalam menjaga lingkungan khususnya irigasi menunjukkan hal yang positif. Pemerintah Desa juga sudah mengupayakan pengajuan proposal untuk pembenahan TPT yang ada di Desa Bayongbong namun memang saat ini belum menunjukkan hasil yang baik. Melihat dari hal tersebut, kepemimpinan Kepala Desa sudah cukup baik dalam memberikan pengaruhnya untuk mengedukasi masyarakat guna mencapai visi dan misinya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Kepala Desa masih dinilai kurang dalam mengedukasi salah satu wilayahnya yakni Dusun III dalam menjaga kelestarian saluran irigasi di Dusun III.

Suatu organisasi memerlukan proses manajemen dan program untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks Desa Bayongbong, pengelolaan irigasi dilakukan melalui program-program seperti kerja bakti, distribusi air bersih, pembuatan Pamsimas, dan pembuatan mural. Program kerja bakti rutin melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memelihara saluran irigasi dan pembuatan mural diharap dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Bayongbong dalam memelihara saluran irigasi. Dalam hal distribusi air bersih, program tersebut telah rutin dijalankan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat, namun ada kalanya masyarakat khususnya masyarakat Dusun III melontarkan kritik terhadap ketidakmerataan akses terhadap air bersih. Permasalahan sampah juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan irigasi, namun belum ada sanksi resmi kepada masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Selain itu, Pemerintah Desa juga sudah sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang ada, namun

kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi program-program yang ada. Kemudian pelaporan dan komunikasi antara tingkat RT, RW, Kepala Dusun, dan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi khususnya Pemerintah Desa dalam pengelolaan saluran irigasi di dua dari tiga wilayahnya sudah cukup baik. Tetapi, Pemerintah Desa masih memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan kapasitas organisasinya, seperti Masih kurangnya sumberdaya manusia yang dapat mengelola kondisi saluran irigasi desa, baik dari segi kuantitas dan kualitas, masih kurangnya fasilitas bangunan irigasi, kurangnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana yang dibuat dalam anggaran desa terkait permasalahan irigasi dan kurangnya teknologi yang cocok untuk mengatasi kekeringan di wilayah Dusun III, kurangnya monitoring Kepala Desa di wilayah Dusun III dan belum adanya SOP terkait pengelolaan irigasi di Desa Bayongbong, dan Pemerintah Desa Bayongbong perlu, dan mempertahankan kerjasama yang harus tetap dijalin dengan lembaga-lembaga lainnya. Pemerintah Desa dalam pengelolaan irigasi memiliki hubungan dan melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga, yaitu Dinas PUPR Kabupaten Garut melalui UPT Dinas Kabupaten Garut yang berada di Desa Bayongbong itu sendiri, LPM Desa Bayongbong, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, P3A Mitra Cai, dan masyarakat. Hubungan dan kerja sama yang dijalin sudah berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berdampak pada pengelolaan saluran irigasi Desa Bayongbong itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarullah, M. (2020). Analisis Pembangunan Saluran Irigasi Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Petani Padi di Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Teknik*, 1(2), 25-37.
- Andriana, P. (2022). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Irigasi (Studi Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai) [Doctoral dissertation, Universitas Medan Area].

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fiszbein, A. (1997). The emergence of local capacity: lessons from Colombia. *World Development*, 25(7), 1029-1043.
- Horton, D., et al. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations around the World*, International Service for National Agricultural Research.
- Iqbal, M., Mirna, R., & Susanti, E. (2022). Kapasitas Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar dalam Pengembangan Benih Padi Induk. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 336-340.
- Sidauruk, T. (2009). Pengelolaan Irigasi di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan. *Jurnal Geografi*, 1(1), 65-72.
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Riset Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supadi, S. (2007). Ketersediaan Debit Air untuk Irigasi Pedesaan di Sungai Cipeles Jawa Barat. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 15(3), 308